

Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang

Oleh :

Sonny M. Takumansang
John Hein Goni
J. Lumolos
Wiliam Areros

PNPM Mandiri dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui PNPM Mandiri masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap evaluasi maupun pemeliharaan. Kondisi masyarakat yang miskin dan tak berdaya membuat masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado sudah cukup maksimal. Disarankan agar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada PNPM Mandiri Perkotaan diperlukan peran stakeholder yang terkait terutama mengajak masyarakat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih paham akan tujuan dan sasaran program. Fasilitator sebagai motor penggerak masyarakat lebih aktif lagi dan sebaiknya tetap di lokasi kegiatan dalam tahun berjalannya kegiatan. Penggantian fasilitator membutuhkan waktu penyesuaian dalam mengenali dan mendekati masyarakat. Di samping fasilitator PNPM sebaiknya juga dibantu oleh tenaga pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan pada komponen lingkungan sebaiknya lebih banyak yang dikerjakan secara kerja bakti/gotong royong sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap prasarana dan sarana yang dibangun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan antara lain keterlibatan atau peran serta dan kontribusi dari seluruh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di negara sedang berkembang sangatlah penting, dik-

etahui bersama bahwa dalam hal ini masih merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah di negara-negara tersebut, di negara ini partisipasi masyarakat masih tergolong lemah baik dari aspek semangat kesadaran maupun kemampuan. Lemahnya semangat dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan, itu berhubungan erat dengan masalah-masalah seperti kemiskinan, serta keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh mereka, disamping itu juga ada hubungan dengan lemahnya kepemimpinan pemerintah dalam hal ini lurah atau kepala desa yang dapat menggugah serta menggairahkan tumbuhnya semangat berpartisipasi.

Tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia melalui presiden mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri seb-

agai salah satu kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, selain itu PNPM Mandiri dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki local governance dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Kelompok masyarakat yang terbentuk dimaksudkan untuk menghilangkan marginalisasi penduduk miskin dan menjadi model jaringan pengaman sosial.

Melalui PNPM Mandiri masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap evaluasi maupun pemeliharaan, untuk mencapai harapan dimaksud tentu membutuhkan kerja keras dari semua pihak baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Pendekatan top-down yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan banyak mendapat kritik dari berbagai pihak karena dinilai pengaturan dalam pelaksanaan program semuanya dikendalikan oleh pemerintah lewat organisasi-organisasi sebagai pelaksana dan pengawas. Kondisi seperti ini dapat membuat masyarakat menjadi tidak berdaya dan tidak dilibatkan secara aktif.

Kondisi masyarakat yang umumnya miskin dan tak berdaya membuat masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang terdiri dari 7 (tujuh) Lingkungan dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari kantor lurah Teling Bawah berjumlah 3.939 orang dengan jumlah keluarga miskin 221 KK. Apabila ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado dalam pembangunan secara keseluruhan masih lemah, baik dari aspek semangat kesadaran maupun kemampuan untuk berpartisipasi, disamping itu lemahnya pelaku-pelaku PNPM Mandiri perkotaan yang dapat menggugah serta menggairahkan tumbuhnya semangat partisipasi masyarakat. Untuk menjawab permasalahan di atas maka mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan sasaran kegiatan pembangunan prasarana fisik melalui kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado. Di dalam penelitian ini dikaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan pembangunan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Segi ilmu diharapkan akan membawa manfaat dalam pengembangan teori khususnya yang berhubungan dengan teori Manajemen Pembangunan dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat.
2. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang terkait khususnya pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
3. Peneliti, selain sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar magister sains juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Sumberdaya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja (Simamora, 2001). Manajemen sumber daya manusia itu merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sumber daya manusia di dalam suatu organisasi yang dapat digunakan secara efektif dalam mencapai berbagai tujuan.

Wahyudi (1996), mengungkapkan bahwa : manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi yang bersangkutan. Pengertian tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi tidak hanya menyangkut hal mengenai ketenagakerjaan tetapi menjangkau lingkungan

organisasi yang mempengaruhi sumber daya manusia sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pokok dari manajemen sumber daya manusia yaitu mewujudkan pendayagunaan secara optimal sumber daya manusia di dalam suatu organisasi.

B. Konsep Pembangunan

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Bratakusumah, 2003).

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1996), mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

C. Manajemen Pembangunan

Manajemen pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri-ciri yang khas, seperti juga administrasi publik (negara) dengan kekhasan tertentu. Studi mengenai manajemen telah banyak mengalami perkembangan, namun teori pokoknya tidak berubah. Sekurang-kurangnya ada tiga kegiatan besar yang dilakukan oleh manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengkajian mengenai fungsi-fungsi manajemen dapat dikembangkan secara bervariasi sesuai kebutuhan.

D. Partisipasi Masyarakat

Menurut Subakti (2010), partisipasi adalah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya ialah orang itu, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut (Prasetya, 2008). Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan ma-

syarakat terhadap suatu kegiatan secara sukarela. Partisipasi sebagai bentuk komunikasi antar masyarakat maupun masyarakat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring suatu kegiatan agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial. Soemarno dan Ismet (1999), mengungkapkan pendapatnya bahwa partisipasi tumbuh karena adanya dorongan dari diri manusia yang muncul karena kesadaran, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar, karena partisipasi bersifat semu dan mudah berubah atau lenyap.

Tahap-tahap dari partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam 4 (empat) jenjang, yaitu: "Participation in decision making, participation in implementation, participation in benefits, participation in evaluation." (Cohen and Uphoff's, 1980). Partisipasi dalam pembuatan suatu keputusan sangat diperlukan dikarenakan menyangkut nasib masyarakat sendiri. Tahap partisipasi kedua yaitu partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berguna bagi pelaksana pembangunan. Tahapan partisipasi ketiga yaitu partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Hasil dari setiap kegiatan hendaknya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan yang terakhir dari partisipasi dalam evaluasi. Setiap penyelenggara kehidupan bersama, dapat dinilai berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

E. PNPM Mandiri Perkotaan

Di dalam rangka meningkatkan dan memperluas program yang pro rakyat, maka pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi makro antara lain program-program pemberdayaan masyarakat diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang nantinya diharapkan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perluasan dan peningkatan kesempatan kerja sehingga tujuan untuk pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai (materi Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas pada Rapat Kerja Nasional PNPM-P2KP Tahun 2012).

F. Masyarakat Miskin

Menurut Bagong (2005), bahwa kemiskinan ialah ketidakmampuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan material seseorang. Pendapat lain sejalan dengan pengertian miskin menurut Poerwadarmita (2000), sebagai orang yang tidak berharta benda. Tentang kemiskinan, secara singkat dapat diartikan sebagai suatu

standar tingkat hidup rendah, yaitu adanya suatu kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Usman, 1998).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dikarenakan peneliti mengkaji partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan hal tersebut maka metode kualitatif merupakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Moleong (2000) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, selanjutnya penelitian kualitatif itu berakar pada latar belakang alamiah sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan penelitiannya pada usaha menemukan teori dasar yang bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati kedua belah pihak antara peneliti dan subjek penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian berjumlah 15 orang dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mewakili populasi penelitian, yang terdiri dari : Lurah (1 orang), pengurus LPM (1 orang), Badan Keswadayaan Masyarakat (2 orang), Tim Pengelola kegiatan/TPK (4 orang), anggota masyarakat (7 orang).

D. Sumber Data

Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara berjumlah 15

orang informan sebagai sampel penelitian. Di dalam penelitian ini dilengkapi juga dengan data sekunder berupa laporan, aturan-aturan maupun arsip yang diperoleh dari pemerintah kecamatan dan kelurahan maupun dokumen atau literatur pendukung yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka dipergunakan tahap-tahap yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses analisa data yang digunakan dalam menganalisa partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ialah analisis kualitatif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : wawancara dan observasi,

F. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado meliputi : tahapan perencanaan kegiatan lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan, pelaksanaan kegiatan lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan dan pelestarian hasil kegiatan lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yakni analisis data yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai selesainya penelitian (Sugiono, 2008) yaitu :

1. Reduksi Data
2. Display Data
3. Verifikasi

BAB IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan dengan pengamatan wawancara maka dapatlah dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang sudah cukup maksimal.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan PNPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam proses perencanaan kegiatan PNPM seluruh

masyarakat sudah di undang untuk berpartisipasi. Menurut infotman, pelaksanaan PNPM Mandiri memerlukan dukungan dari berbagai pihak meliputi : (1). Lembaga yang mendukung dari aspek kebijakan seperti DPR, DPRD, Pemerintah Daerah. Posisi Pemerintah dan DPRD dalam hal ini menjadi dominan, sebab PNPM Mandiri sebagai program pemerintah (pusat) akan memiliki fase akhir dan diteruskan menjadi program pemerintah daerah. (2). Lembaga yang mendukung terjadinya partisipasi untuk mengembangkan dan mereplikasi program, seperti lembaga donor, bantuan dunia usaha/ industri, (3) pihak-pihak yang memberikan dukungan publik dari kelompok peduli yaitu kelompok profesional, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga atau kelompok peduli lainnya dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka terlihat pentingnya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan PNPM Mandiri perkotaan.

Informan lainnya berpendapat bahwa sangat penting dalam suatu kegiatan melibatkan masyarakat, karena apa yang akan dibangun khususnya kegiatan lingkungan dari Program PNPM mengangkut kepentingan masyarakat, sehingga apa yang masyarakat harapkan dapat terealisasi jika masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan keseluruhan program PNPM.

Kegiatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan salah satu bagian pelaksanaan yang didanai program PNPM Mandiri Perkotaan secara stimulan untuk mengentaskan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. PNPM Mandiri Perkotaan hanya menyediakan alternative kegiatan pembangunan lingkungan, namun masyarakat sendiri yang menentukan jenis dan bentuk kegiatan prasarana dan sarana agar sejalan dengan kebutuhan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Partisipasi pada tahap perencanaan ialah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana suatu kegiatan. Tahap perencanaan, yang dinilai ialah kehadiran masyarakat dalam perencanaan program dan keterlibatan dalam mengemukakan pendapat, dan terlibat dalam identifikasi kebutuhan.

Informan lainnya menjelaskan akan tahapan perencanaan dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat. Pada tahap perencanaan, pihak PNPM Mandiri selaku fasilitator melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa perwakilan dari pihak masyarakat dan biasanya yang hadir dalam FGD ini ialah para tokoh masyarakat. Selain itu, yang hadir dalam FGD ini selain pihak PNPM dan perwakilan masyarakat ialah pihak Badan Keswadayaan Ma-

syarakat (BKM), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), serta pihak kelurahan. FGD ini dilakukan untuk merumuskan kebutuhan masyarakat secara bersama-sama serta menentukan apakah program ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. FGD ini dilakukan untuk menentukan lokasi mana saja yang layak menerima bantuan dana dari program ini. Pihak PNPM mengirimkan undangan kepada para tokoh masyarakat dan pemerintah untuk menghadiri rapat yang diadakan di kantor kelurahan. Setelah pihak PNPM mengadakan rapat dengan tokoh masyarakat dan pemerintah, pihak PNPM pun mengadakan rapat dengan masyarakat. Rapat yang dilakukan bersama masyarakat dilaksanakan di masing-masing lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program selaku penerima program tergolong sedang. Hal ini dikarenakan masyarakat penerima program hanya memberikan sedikit masukan ketika proses FGD sedang dilaksanakan. Selain itu, masyarakat tidak selalu hadir dalam rapat perencanaan yang dilaksanakan oleh pihak PNPM.

Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa di dalam proses perencanaan penentuan program semua masyarakat yang diundang hadir untuk mengikuti rapat. Menurut informan, di dalam suatu kelurahan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan untuk pembangunan, akan tetapi tentu saja tidak semua kebutuhan akan pembangunan akan dapat langsung terpenuhi, semuanya membutuhkan proses. Di dalam tahap perencanaan pembangunan, pertemuan untuk menentukan prioritas pembangunan sangatlah penting. Di dalam program PNPM Mandiri Perkotaan, biasanya semua kebutuhan akan pembangunan dari masyarakat didata dalam program jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronankis), akan tetapi apa yang tertuang dalam PJM pronankis ini tidak semuanya langsung dapat direalisasikan. Sebelum pelaksanaan pembangunan, diadakan dulu pertemuan-pertemuan antara pihak fasilitator PNPM, pemerintah, LKM dan masyarakat yang menentukan mana kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, serta di lokasi mana akan dilaksanakan, semuanya didiskusikan, untuk itulah sangat penting adanya partisipasi aktif dari masyarakat, karena tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat maka tujuan dari program ini tidak akan bisa tercapai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di dalam proses perencanaan masyarakat sudah cukup baik dalam memberikan ide-ide guna kemajuan pembangunan. Menurut informan dengan adanya ide-ide dari masyarakat maka apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari program ini akan tercapai dan

akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibangun oleh KSM/panitia dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana perumahan dan permukiman baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan individu masyarakat miskin (Individual). Semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut haruslah memenuhi persyaratan kelayakan teknis.

Menurut informan di Kelurahan Teling Bawah kegiatan lingkungan yang paling banyak diusulkan yaitu menyangkut prasarana air bersih, hal ini dikarenakan letak dari Kelurahan Teling bawah yang jika hanya mengharap air dari PAM tidak akan mencukupi sehingga sangat dibutuhkan adanya tambahan pembangunan prasarana air bersih.

Secara umum mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KSM/panitia dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, mencakup 3 tahapan yaitu a) tahap persiapan dan perencanaan teknis, b) tahap pelaksanaan pembangunan dan c) tahap pasca konstruksi (pemanfaatan & pemeliharaan).

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan memang sudah cukup maksimal akan tetapi ada yang menjadi permasalahan yaitu kurangnya informasi kepada masyarakat tentang program PNPM mandiri perkotaan. Informasi yang lengkap dan utuh merupakan suatu modal penting bagi masyarakat untuk memahami dengan baik tentang pentingnya program pemberdayaan dalam hal ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan bagi seluruh masyarakat. Pemahaman yang baik dan tepat akan mengembangkan kesadaran masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif demi pembangunan. PNPM-MP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Pada dasarnya, pemberdayaan muncul dikarenakan adanya kondisi sosial ekonomi yang rendah pada masyarakat yang memberi akibat tidak mampu dan tidak tahu atau akses informasi minim. Mereka tidak dapat menikmati pendidikan yang memadai. Sehingga akibat dari semuanya itu produktivitas masyarakat pun menjadi rendah. Kesadaran terhadap keadaan ini menjadi sangat penting untuk bisa melakukan perubahan ke arah keberdayaan dan kemandirian.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelak-

sanaan Kegiatan PNPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah turut serta dalam pelaksanaan kegiatan PNPM. Masyarakat sudah berpartisipasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan PNPM. Menurut informan, partisipasi pada tahap pelaksanaan program merupakan keikutsertaan dan keaktifan dalam pelaksanaan kegiatan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pihak PNPM, BKM, dan UPL. Partisipasi diukur berdasarkan banyaknya kegiatan yang diikuti responden, akses dan kontrol terhadap program, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Pihak PNPM selaku penanggung jawab keseluruhan program PEB PNPM-MP memberikan akses kepada masyarakat untuk menentukan kegiatan yang dirasakan menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Informan lainnya berpendapat bahwa tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat maka kegiatan lingkungan di kelurahan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Di dalam program PNPM Mandiri perkotaan suatu kegiatan lingkungan akan bisa dilaksanakan jika sudah ada persetujuan partisipasi masyarakat sebesar 30% dari total anggaran yang dibutuhkan, partisipasi masyarakat bisa berupa tenaga kerja, bahan ataupun pemberian makanan kepada para pekerja. Jika masyarakat sudah menyanggupinya maka partisipasi tersebut akan dicatat dalam proposal dan ditandatangani di atas meterai oleh pihak masyarakat dan juga KSM (kelompok swadaya masyarakat) yang dipercayakan untuk pembangunan kegiatan lingkungan tersebut.

Menurut informan, partisipasi masyarakat pada tahap persiapan dan perencanaan teknis sudah cukup baik, masyarakat yang diwakili oleh KSM, selalu berusaha mempersiapkan semua persyaratan agar supaya proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan. Akan tetapi ada informan yang berpendapat bahwa terkadang ada sebagian masyarakat yang sangat sulit untuk diajak bekerja sama, walaupun sebenarnya kegiatan yang akan dibangun bermanfaat langsung kepada mereka. Contohnya, masyarakat sulit untuk memberikan tenaga pada saat pelaksanaan pembersihan lokasi proyek, tentunya ini akan sangat menghambat pelaksanaan kegiatan kedepan, karena jika semua tenaga kerja harus dibayar, maka tidak mungkin dana yang diberikan oleh pihak PNPM mandiri akan mencukupi.

Baik KSM sebagai pelaksana kegiatan lingkungan maupun kegiatan lingkungan yang diusulkan oleh KSM untuk dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan umumnya sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Program.

Informan lainnya berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM mandiri perkotaan belum maksimal, hal ini dikarenakan umumnya apa yang menjadi kesepakatan 30% partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan hanyalah di atas kertas, akan tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Hal ini terlihat dari umumnya para pekerja walaupun untuk membangun lingkungannya sendiri mereka harus meminta upah, padahal sebenarnya mereka dapat memberikan sumbangan tenaga agar nantinya kegiatan lingkungan yang sementara dilaksanakan dapat lebih baik kualitasnya. Akan tetapi karena tidak adanya partisipasi masyarakat maka pihak KSM berupaya untuk membuat dana yang diberikan cukup untuk pembangunan, sehingga terkadang kualitas yang dihasilkan kurang, hal ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat itu sendiri, karena manfaat dari pembangunan tersebut tidak akan bisa lama dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan umumnya sudah didukung oleh berbagai pihak seperti BKM, UPL, serta masyarakat penerima manfaat langsung yaitu warga miskin dan warga sekitar. KSM/Panitia sebagai pelaksana pembangunan pun akan didukung peran sertanya oleh Fasilitator Kelurahan.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Kegiatan PNPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat turut serta dalam proses pelestarian hasil pembangunan lewat program PNPM. Informan berpendapat bahwa, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi memelihara hasil pembangunan lewat kegiatan lingkungan pada program PNPM mandiri perkotaan sudah cukup baik, karena masyarakat menyadari akan arti penting dari hasil pembangunan tersebut. Informan memberikan contoh, ada sebuah pembangunan jalan setapak dari rabat beton, seiring berjalannya waktu mulai terdapat kerusakan kecil. Karena masyarakat menyadari akan pentingnya jalan setapak tersebut, maka masyarakat secara bergotong royong selalu memperbaiki kerusakan tersebut agar tidak semakin membesar, sehingga jalan rabat beton tersebut dapat awet dan dapat diggunakan masyarakat.

Penyiapan organisasi pengelola pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana disini mencakup kegiatan (1). pembentukan organisasi pengelola (struktur organisasi) termasuk penentuan orang-orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja, (2). Penyusunan rencana kerja pemanfaatan dan pemeliharaan.

Pada prinsipnya semua prasarana yang telah dibangun harus dipelihara, namun demikian, mengingat pemanfaat setiap prasarana tidak seluruhnya sama maka pembentukan/pengorganisasian O&P disini hanya diprioritaskan pada prasarana yang berifat umum/publik dan prasarana kelompok, sedangkan untuk prasarana yang bersifat individu atau penggunaan oleh satu keluarga saja, tidak perlu dibentuk organisasi pengelolanya, seperti jamban keluarga, saluran limbah rumah tangga, karena sudah langsung dipelihara oleh masing-masing keluarga pengguna.

Informan lainnya berpendapat bawa ada sebagian masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan hasil pembangunan lewat kegiatan lingkungan pada program PNPM Mandiri Perkotaan, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting pembangunan tersebut, awalupun sebenarnya masyarakat turut menggunakan hasil pembangunan tersebut.

Salah satu kegiatan penting dari seluruh proses PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya pada pendekatan pelaksanaan kegiatan lingkungan ini ialah kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan (atau Operasi dan Pemeliharaan, disingkat O&P) yang dilakukan melalui inisiatif dan kesadaran masyarakat oleh KSM/Pengelola O&P sebagai penggerak utama dari kegiatan ini.

Hampir semua pembangunan prasarana yang selesai dibangun ternyata mengalami kerusakan karena tidak terpelihara. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana rehabilitasi dari sektor/instansi terkait, tidak ada swadaya masyarakat untuk pemeliharaan dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut, sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Walaupun dapat dinikmati akan tetapi jangka waktu pemanfaatannya menjadi terbatas (kurang dari umur yang direncanakan). Selain itu, kualitas prasarana yang dibangun menjadi kurang terjamin dan harapan diperolehnya manfaat yang berkelanjutan tidak dapat tercapai.

Apabila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Karena itu perlu adanya ketegasan, penanggungjawab dan rencana pengelolaan (pemanfaatan dan Pemeliharaan) prasarana yang baik sesuai kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Di dalam proses perencanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Perkotaan) masyarakat sudah berpartisipasi dengan cukup baik hal ini terlihat pada proses perencanaan masyarakat sudah berperan aktif serta sudah cukup baik dalam memberikan ide-ide guna kemajuan pembangunan, dengan adanya ide-ide yang berasal dari masyarakat maka program pembangunan yang dilakukan tepat ada sasaran.
2. Masyarakat sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PNPM terlihat dari masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga dan peralatan untuk membangun lingkungan mereka, namun dalam memberikan sumbangan dana memang beberapa saja yang secara sukarela memberi sumbangan. Setelah selesainya pelaksanaan kegiatan maka masyarakat dapat memanfaatkan hasil kegiatan tersebut dan umumnya masyarakat sangat merasa terbantu dengan dilaksanakannya kegiatan PNPM dilingkungannya. Selanjutnya fasilitator bersama dengan pemerintah dan masyarakat melaksanakan evaluasi hasil kegiatan, dan umumnya dari hasil evaluasi didapati bahwa kegiatan PNPM mandiri yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya seperti dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan masyarakat harus berpartisipasi atau memberikan swadaya minimal 30% dari total anggaran.
3. Masyarakat turut serta dalam proses pelestarian hasil pembangunan lewat program PNPM. Masyarakat ingin hasil pembangunan bisa bertahan lama, dan dimanfaatkan lebih lama di lingkungan mereka, sehingga masyarakat secara bergotong royong memelihara seluruh hasil pembangunan yang ada.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan seperti tersebut di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada PNPM Mandiri Perkotaan diperlukan peran stakeholder yang terkait terutama mengajak masyarakat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih paham akan tujuan dan sasaran

program.

2. Fasilitator sebagai motor penggerak masyarakat lebih aktif lagi dan sebaiknya tetap di lokasi kegiatan dalam tahun berjalannya kegiatan. Penggantian fasilitator membutuhkan waktu penyesuaian dalam mengenali dan mendekati masyarakat. Di samping fasilitator PNPM sebaiknya juga dibantu oleh tenaga pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah.
3. Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan pada komponen lingkungan sebaiknya lebih banyak yang dikerjakan secara kerja bakti/gotong royong sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap prasarana dan sarana yang dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

Abe, A. 2001. Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakerasa Rakyat dalam Otonom. Daerah. Lapera Pustaka Utama : Yogyakarta.

Alexander, T., 1994. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Anwar, A.M. 2005. Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bagong, S. 2005. Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasan, Erlangga University Press, Surabaya.

Budiardjo, M., 1985. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia : Jakarta.

Budiman, A., 1996. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta.

Conyers, D., 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada.

Cohen J.M and Uphoff. 1980. Rural Development Participation. New York. Itacha.

Etzioni, 1999. Partisipasi Masyarakat. www.google.com. Search 15 Juli 2012.

Frank, A. G., 1994. "Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi". Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

Gomes, F. C., 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Hasibuan, M. S.P. 2003., Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Bumi Aksara. Jakarta.

Handoko. T. H., 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Liberty. Yogyakarta.

Husni, H., 2007. Teori Pembangunan. www.google.com. Search 15 Juli 2012.

Ilah. 1999. Conceptual Framework for the Country Studies of Rural Development. In Inayatullah (ed.). Approaches to Rural Development: Some Asian Experienc-

- es. Asian and Pacific Development Administration Center. Kualalumpur.
- Kartasasmita, G., 1994. Perencanaan Pembangunan Nasional. Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi : Malang.
- Kusumaatmadja, M., 2006, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. cetakan ke 2, Alumni : Bandung.
- Kuncoro, M., 2000. Ekonomi Pembangunan (Development Economics) Pusat Penerbitan Universitas Terbuka :Jakarta.
- _____, 2003. Ekonomi Pembangunan I (Development Economics I) Pusat Penerbitan Universitas Terbuka :Jakarta.
- _____, 2004. Ekonomi Pembangunan II (Development Economics II) Pusat Penerbitan Universitas Terbuka :Jakarta.
- Mangkunegara, A. P., 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Maskun, S., 1993. Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: PT Media Madya Mandala.
- Mikkelsen, Britha. 2001. Metode Penelitian Partispatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman, 1992. Analisa Data Kualitatif. UI Press Jakarta
- Munandar, 1986. Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial. Bandung: Eresco.
- Nasution, 2001. Pengantar Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, T., 1999. Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, I dan I. Dahuri, 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Penerbit PT Pustaka LP3ES Jakarta.
- Prasetyo, B., 2008. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Portes, A., M. Castell, and L. A. Benton, 1989. The Informal Economy-Studies in Advanced and Less Developing Countries. Bilmore: The John Hopkins University Press.
- Poewadarminta, S. 2000. Dimensi-Dimensi Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan, Dalam Perangkap Kemiskinan, Airlangga Press, Surabaya.
- Riyadi, D. dan S. Bratakusumah, 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah. Rajawali : Jakarta
- Sastropoetro, S., 1998. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
- Salam, S. D., 2002. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Penerbit : Djambatan.
- Simamora, H., 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan 3, STIE YKPN. Yogyakarta.
- Siagian, S.P., 1994. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Sjahrir., 1986. Parameter dalam Pembangunan ekonomi; Perencanaan Pembangunan: Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi., Aksara Baru, Jakarta,
- Soemanto, 2003. Metode-Metode Penelitian. Gramedia. Jakarta.
- Sofyandi, H., 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sutrisno, E., 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Surbakti, R., 2010. Memahami Ilmu Politik, Gramedia. Jakarta.
- Sumardi, M., 2005. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sulistiyani, A. T. dan Rosidah., 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sumarno A.P, dan T. S. Ismet, 2000, Dasar-Dasar Komunikasi Politik Bandung. Alumnus Press: Bandng.
- Sugiyono, 2008. Statistik Nonparametris Untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, E., 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung Refika Aditama.
- Syafie, I., 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung.
- Terry, G. R. dan Rue, L. W., 2005. Dasar – Dasar Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tikson. D. T., 2005. Keterbelakangan dan Ketergantungan : Teori Pembangunan Di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Makassar : Inninawa.
- Tjokrowinoto, M., 1996 Pembangunan : Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, B., 1995, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
- Usman, S. 1998. Memberdayakan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta.